



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS
KESEHATAN)

UNIT KERJA : KESEKRETARIATAN DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELFANETTI
2. Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 93120

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 814 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/45 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 165.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 103.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 168.267.026

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.966.367.026
III. HUTANG	Rp.	1.306.297.516
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.660.069.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.